



## Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkungan Universitas

\* Sunny Ummul Firdaus, Muhamad Alief Hidayat, Muhammad Herzegovin Laxamana

Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM Universitas Sebelas Maret

\*Email: [firdaussunny@staff.uns.ac.id](mailto:firdaussunny@staff.uns.ac.id)

**Abstract:** The journal entitled "Urgency of Organizing the Center for The Study of Democracy and National Resilience in the University Environment" outlines the problem of declining awareness and understanding of young people in this case students on the application and implementation of democracy in Indonesia. This becomes important considering that democracy in this case Pancasila democracy becomes one of the milestones of the life of the nation and state and affects all aspects of life. The University as an educational institution certainly also has a responsibility for students' understanding of the application of democracy both in scientific learning activities and activities of the implementation of democracy in the community directly. The implementation of democratic education certainly requires alignment of practical conditions and reality. In this study the authors used socio-legal legal research methods. The final results of this study are the model of organizing a center for the study of democracy and national resilience in the university environment, the study of the reduction of awareness and participation of students in the implementation of democracy, and recommendations for the government especially all universities to organize centers for the study of democracy and national resilience of students as an effort to improve democracy in order to create an active and democratic state.

**Keywords:** Democracy, Students, Center for Studies

**Abstrak:** Jurnal yang berjudul "Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional di Lingkungan Universitas" ini menguraikan mengenai permasalahan menurunnya kesadaran dan pemahaman kawula muda dalam hal ini mahasiswa pada penerapan dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat demokrasi yang dalam hal ini demokrasi Pancasila menjadi salah satu tonggak keberjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Universitas sebagai institusi Pendidikan tentu juga memiliki tanggung jawab atas pemahaman mahasiswa mengenai penerapan demokrasi baik dalam kegiatan pembelajaran keilmuan maupun kegiatan pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat secara langsung. Penyelenggaraan Pendidikan demokrasi tentu memerlukan penyesuaian terhadap kondisi praktis dan realitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu adanya model penyelenggaraan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional di lingkungan universitas, kajian mengenai penurunan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan demokrasi, dan rekomendasi bagi pemerintah terkhusus seluruh universitas untuk menyelenggarakan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional mahasiswa sebagai upaya peningkatan demokrasi guna terciptanya penyelenggaraan negara yang aktif dan demokratis.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Mahasiswa, Pusat Studi Mahasiswa

## **A. Pendahuluan**

Demokrasi sejatinya merupakan pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara garis besar demokrasi adalah suatu tata cara hidup berkelompok baik di dalam hal berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa atau yang diinginkan oleh manusia yang hidup berkelompok tersebut, dengan demikian dapat dipahami adanya demokrasi liberal, demokrasi komunis demikian juga demokrasi pancasila.<sup>1</sup> Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara tentu memiliki esensi yang menjadi landasan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang implementasinya sebagaimana tercermin dalam Pembukaan dan UUD NRI 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945) sedangkan asas demokrasi Pancasila tercantum dalam sila ke 4 Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.<sup>2</sup> Secara konseptual, keseluruhan nilai-nilai Pancasila akan menjadilandakan mekanisme dan sekaligus tujuan demokrasi Indonesia. Dengan demikian nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan arahan demokrasi Indonesia.<sup>3</sup>

Penanaman nilai demokrasi ini tentu telah dilaksanakan dalam berbagai jenjang pendidikan termasuk dalam jenjang perguruan tinggi melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) serta Pendidikan Pancasila. Hal ini dipandang sangat penting mengingat generasi muda yang dalam hal ini mahasiswa memiliki peran penting sebagai bagian dari pihak yang turut menentukan kemajuan suatu negara. Pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya.<sup>4</sup> Pemuda dan mahasiswa adalah harapan bagi masa depan bangsa.<sup>5</sup> Hal inilah yang mendorong adanya penanaman nilai dan moral demokrasi pada diri mahasiswa, terlebih dengan adanya berbagai pengaruh baik ilmu, ideologi, pandangan dan kebudayaan asing menjadikan tantangan tersendiri bagi mahasiswa untuk mempertahankan identitas serta nilai demokrasi guna mencapai ketahanan nasional.

Untuk melaksanakan demokrasi, menurut Henry ada beberapa nilai yang harus dicermati seperti menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya pergantian pimpinan secara damai dalam suatu masyarakat, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah

---

<sup>1</sup> Wahjono, Padmo, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta 1993.

<sup>2</sup> Hatta, Mohammad, *Kebangsaan Dan Kerakyatan*, LP3ES, Jakarta, 1998, Hal.87

<sup>3</sup> Manan, Bagir, *Teori Dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 1966

<sup>4</sup> Rifaldi. Ronny Gosal dan Ventje Kasenda Pinilas, *Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud)*, Eksekutif Jurnal Volume 2, Nomor 2 Tahun 2017. Hal 6

<sup>5</sup> Heri, Jon, Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum Di Indonesia, *Nurani Jurnal* Volume 15, Nomor 1 Tahun 2015. Hal 92

laku dan menjamin tegaknya keadilan.<sup>6</sup> Berkaitan dengan pengimplementasian nilai demokrasi dalam pergantian pimpinan, kawula muda sebagai bagian dari warga negara tentu memiliki hak untuk memberikan hak pilihnya, namun saat ini pelaksanaan demokrasi dalam kawula muda masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Adapun berdasarkan data survey *Jeune & Raccord Communication* menjelaskan bahwasanya pemilih muda yang memiliki tendensi melakukan golongan putih (golput) dengan tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki persentase sebesar 40%. Selain itu data mengenai pandangan pemuda terhadap demokrasi Indonesia juga terdapat dalam data survei Indikator. Mereka yang menjawab bahwa Indonesia tetap sama keadaannya (35.7%), berimbang dengan yang menjawab Indonesia menjadi kurang demokratis (40%). Sedangkan yang menjawab Indonesia lebih demokratis hanya 15.5%.<sup>7</sup>

Ketidakoptimalan keterlibatan pemuda dalam hal pelaksanaan demokrasi tentu sedikit banyak disebabkan karena adanya stigma negatif terhadap demokratisasi Indonesia yang tentu dilatarbelakangi oleh berbagai unsur. Lebih lanjut seperti yang tercermin pada pelaksanaan demokrasi pada UUD NRI 1945 tingkat keterlibatan dalam pemilu yang rendah tentu perlu untuk diakomidir dengan baik sebagai upaya perbaikan secara preventif dan represif. Keberadaan pusat demokrasi dan ketahanan nasional dalam lingkungan universitas tentu menjadi salah satu upaya pendorong dalam peningkatan pemahaman dan tingkat demokratis pada setiap mahasiswa. Terlebih pelaksanaan demokrasi tidak hanya mencakup pada pelaksanaan pemilu nasional maupun dalam tingkat kampus, melainkan juga mencakup pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan hubungan antar masyarakat. Universitas sebagai bagian dari institusi pendidikan tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal pembentukan pemahaman, pola pikir dan keilmuan yang dimiliki mahasiswa. Melalui pembelajaran yang komprehensif tentu dapat memberikan efek yang besar bagi mahasiswa untuk melaksanakan nilai demokrasi dan ketahanan nasional sebagai bagian dari kewajiban warga negara dalam berpartisipasi langsung baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun hidup bernegara. Pembentukan bidang keilmuan atau cabang ilmu demokrasi dan ketahanan nasional ini tentu memerlukan berbagai penelitian dan pengamatan sosiologis serta realitas lapangan yang ada yang nantinya akan berimplikasi langsung pada pola pembelajaran dan kurikulum studi yang dapat disesuaikan sehingga dapat mempermudah penerimaan pada mahasiswa dan dapat menjadi pijakan keilmuan yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun penelitian dan pengkajian mengenai permasalahan demokrasi yang terjadi di kalangan kawula muda dan mahasiswa ini bertujuan untuk menyusun dan memformulasikan secara ideal atas pelaksanaan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional dalam meningkatkan kesadaran demokrasi mahasiswa sehingga permasalahan mengenai penyimpangan demokratisasi dapat ditekan. Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas mengenai urgensi penyelenggaraan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional di lingkup universitas dan bentuk penyelenggaraan ideal atas pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional di lingkup universitas.

---

<sup>6</sup> Muntoha Dan Puji Dwi Darmoko, *Pergeseran Demokrasi Pancasila Ke Demokrasi Liberal (Praktek Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi)*, Jurnal Madaniyah Volume 7, Nomor 2 Tahun 2017, Hal. 365

<sup>7</sup> Indikator. (2021). *Survei Nasional Suara Anak Muda Tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa*, [https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator\\_21-Maret-2021.pdf](https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator_21-Maret-2021.pdf). [Accessed, September 30.2021]

## **B. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian sosiolegal. Wheeler dan Thomas menyatakan bahwa studi sosiolegal merupakan suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang peneliti sociolegal menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial yang lain, melainkan hukum dan studi hukum.<sup>8</sup> Pendekatan sosiolegal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.<sup>9</sup>

Metode ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis mengenai permasalahan yang terjadi pada kalangan kawula muda khususnya mahasiswa, dimana data yang akan dianalisis dan digunakan yaitu data berupa tingkat kesadaran dan pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi secara langsung dan data pendukung lain berupa data studi kepustakaan mengenai kejadian permasalahan mengenai demokrasi. Lebih lanjut data inilah yang akan mendasari pula adanya penyusunan formulasi ideal mengenai penyelenggaraan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional bagi peningkatan pelaksanaan demokratisasi. Sehingga metode sosio-legal ini bertujuan untuk menemukan rekomendasi dan saran pada regulasi (*Das sollen*) dan penerapan (*Das sein*) peregulasian tersebut sesuai dengan berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis maupun sosiologis.

## **C. Pembahasan**

### **1. Urgensi Penyelenggaraan Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkup Universitas**

Demokrasi merupakan sebuah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tanpa demokrasi kreativitas manusia tidak mungkin berkembang. Demokrasi bukan hanya kriteria di dalam merumuskan cara atau proses untuk mencapai tujuan, melainkan tujuan itu sendiri pun haruslah mengandung nilai-nilai atau norma-norma demokrasi. Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Lebih lanjut berkaitan dengan adanya penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia tentu didasari dengan butir nilai-nilai Pancasila yang berlaku dalam sila satu hingga lima yang mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial. Implementasi demokrasi Pancasila dalam hal politik terlihat dengan adanya nilai keterbukaan serta pendistribusian kekuasaan dan adanya pengenaan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya dalam bidang ekonomi pengimplementasian demokrasi Pancasila berupa adanya pemerataan ekonomi diseluruh segmen dan tingkat masyarakat tanpa memisahkan atau membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu, adanya kesempatan ekonomi yang sama pada setiap warga negara. Adapun

---

<sup>8</sup> Reza .Max Traver Banakar, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Law, Sociology and Method, Tahun 2005.

<sup>9</sup> P. Wiratman, Herlambang, *Penelitian Socio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Tahun 2016, Hal 1

pengimplementasian demokrasi Pancasila dalam bidang sosial yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara, pemenuhan hak warga oleh negara dan pemenuhan kewajiban warga yang harus dilakukan kepada negara, serta adanya penyamaan pelaksanaan kebijakan sosial pada seluruh warga negara.

Nilai fundamental atas pengimplementasian demokrasi tersebut menjadi hal yang utama untuk menjadi poin yang ditekankan dalam studi demokrasi Pancasila kepada pemuda dalam hal ini mahasiswa sebagai bagian dari penanaman norma moral atas pelaksanaan demokrasi yang sesuai. Dengan adanya perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi dan informasi sebagai bagian dari perkembangan dunia, perkembangan kehidupan politik dan permasalahan nasional sedikit banyak tentu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal inilah yang secara umum menyebabkan munculnya beberapa permasalahan kompleks berkaitan dengan adanya penyelenggaraan demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan baik dan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi yang mungkin terjadi. Seperti adanya permasalahan mengenai data *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2020 menunjukkan bahwasanya Indeks demokrasi Indonesia pada tahun tersebut menduduki skor 6,3.<sup>10</sup> Indeks skor ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 6,48, dimana skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 Tahun terakhir.

Keberadaan angka tersebut menunjukkan bahwasanya tren indeks demokrasi Indonesia cenderung terus mengalami penurunan yang signifikan. Survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 2020 Sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran (44,7%), stagnasi/kemandegan (23,7%) bahkan tak sedikit yang menilai kita telah berada dalam otoriterisme (28,9%). Hanya 2,7% responden yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan.<sup>11</sup> Adapun permasalahan yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia dalam segi struktural dan institusional diantaranya yaitu politik uang dalam pemilu, korupsi politik, rendahnya kualitas pemilu, rendahnya efektivitas pemerintahan, rendahnya partisipasi politik dan diskriminasi terhadap minoritas. Hal inipun didukung dengan adanya analisis mediasional pada tahun 2013 bahwasanya kepercayaan menjadi variabel mediator antara kepuasan demokrasi dan partisipasi politik mahasiswa. Artinya pengalaman positif (kepuasan) dapat meningkatkan kepercayaan politik dan pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Permasalahan tersebutlah yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri dimana penerapan demokrasi pada kehidupan bernegara tentu juga mempengaruhi produk hukum yang diterbitkan. Produk hukum yang ideal sesuai dengan prinsip demokratis yaitu produk hukum yang responsif dan otonom yang mencerminkan pemenuhan aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok

---

<sup>10</sup> Putra, Rizki Akbar (2021) *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah Dalam 14 Tahun Terakhir*, Dw.com, <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>. [Accessed, Oktober 02.2021]

<sup>11</sup> Investor.id, (2021) *LP3ES: Ada 31 Masalah Demokrasi Di Indonesia*, Investor.id, 2020, <https://investor.id/nasional/lp3es--ada--31--masalah--demokrasi--di--indonesia>. [Accessed, Oktober 02.2021]

sosial, sehingga mereka relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Proses normatif mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut pelaksanaan pembuatan produk hukum saat ini masih terdapat permasalahan dalam hal ketidaksesuaian dengan Pancasila sebagai dasar ideologi. Berdasarkan data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2019 menyatakan bahwa enam puluh undang-undang dan empat puluh peraturan daerah mengandung ketidaksinkronan dan berpotensi bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwasanya sejatinya penerapan demokrasi Pancasila sebagai hal yang menjadi dasar dalam setiap pembuatan produk hukum lebih dari sekedar nilai demokrasi konvensional. Penitikberatan pada adanya pertimbangan berbagai unsur kompleks dan keberagaman dalam kehidupan berbangsa bernegara tentu menjadi salah satu poin penting dalam hal peninjauan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis atas suatu produk hukum.

Tren penurunan demokrasi ini juga berpengaruh langsung pada penerimaan demokrasi pada kawula muda. Hal ini terlihat dengan adanya data Indikator yang menunjukkan bahwasanya sebesar 36,7 persen kawula muda merasa kurang puas atas praktik demokrasi dan 3,6 persen kawula muda merasa tidak puas sama sekali. Lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mereka yang menjawab bahwa Indonesia tetap sama keadaannya (35.7%), berimbang dengan yang menjawab Indonesia menjadi kurang demokratis (40%). Sedangkan yang menjawab Indonesia lebih demokratis hanya 15.5%. berkaitan dengan pembangunan demokrasi, kawula muda yang menyatakan bahwa pembangunan demokrasi ini lebih penting/jauh lebih penting hanya sebesar 12,4 persen.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan demokrasi berkaitan dengan pergantian pemimpin dalam pemilihan umum *data Jeune & Raccrod Communication*, kawula muda yang memiliki tendensi melakukan golput dengan merasa tidak perlu datang ke TPS sebesar 40 persen. Selanjutnya sebesar 51,8 persen pemilih milenial dari 65,4 persen yang tidak peduli isu politik merasa tidak perlu datang ke TPS. Kemudian, sebesar 30,8 persen pemilih milenial dari 32,5 persen yang aktif mengikuti isu politik merasa tidak perlu datang ke TPS.<sup>13</sup> dimana hal ini juga didukung oleh data Indikator bahwasanya mayoritas sebesar 64,7 persen kawula muda menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik, sama sekali/tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Selanjutnya pemilihan umum ini dilaksanakan pada lingkungan kampus salah satunya yaitu terjadi pada pemilihan umum raya Badan Eksekutif Mahasiswa, dimana salah satu permasalahan terjadi di Universitas Negeri Padang dimana 29.284 (lebih dari 75%) mahasiswa dari total 37.488 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang mempunyai hak pilih, tidak menggunakan hak pilihnya

---

<sup>12</sup> Tribun Jatim. (2019) *BPIP Sebut Ada 100 UU&Perda Potensi Bertentangan Pancasila*, Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review, Tribun Jatim, <https://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2019/11/07/bpip---sebut---ada---%0A100--uu--perda---potensi---bertentangan---pancasila---hasil---kajian---berlanjut---judicial---review>. [Accessed, Oktober 02.2021]

<sup>13</sup> CNN Indonesia. (2019) *Survei Pemilu: Milenial Golput Diprediksi Di Atas 40 Persen*, Cnnindonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190404174723-32-383507/survei-pemilu-milenial-golput-diprediksi-di-atas-40-persen>. [Accessed, Oktober 02.2021]

dalam pesta demokrasi tahun dalam pemilihan umum raya tersebut.<sup>14</sup> Permasalahan tersebut tentu didasarkan pada adanya kepercayaan politik terdapat suatu keyakinan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan individu atau public, dimana individu yang memiliki kepercayaan politik akan cenderung memiliki tingkat partisipasi politik.<sup>15</sup>

Ketidakmaksimalan keterlibatan dan partisipasi kawula muda dalam pelaksanaan demokrasi tersebut tentu perlu untuk diperbaiki. Terlebih di era pandemic Covid-19 yang tengah menjadi bencana diseluruh negara tak terkecuali Indonesia memberikan sentimen-sentimen terhadap negara dalam hal ini pemerintahan negara. Adapun sentiment yang terbangun pada kawula muda berkaitan dengan pelaksanaan penanganan dan penanggulangan Covid-19 ditunjukkan oleh data Indikator, dimana sebesar 55,4 persen kawula muda sangat/cukup percaya Presiden Joko Widodo bisa bekerja secara baik dalam mengatasi Covid-19 dan 30,1 persennya menyatakan biasa saja. Lebih lanjut berkaitan dengan kinerja Menteri Kesehatan dalam menangani Covid-19, sebesar 42,9 persen kawula muda merasa sangat/cukup percaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bisa bekerja mengatasi Covid-19, sedangkan 32,2% menyatakan biasa saja dan 15,2 persennya menyatakan sangat/tidak percaya. Sentimen yang terbangun inilah yang akan memberikan proyeksi yang memperparah terjadi krisis demokrasi yang terjadi pada kawula muda saat ini. Puncaknya permasalahan ini akan menyebabkan demokratisasi di Indonesia dimungkinkan akan berjalan tidak sesuai dengan koridor dan nilai demokrasi.

Terlebih permasalahan demokrasi di lingkungan universitas saat ini tengah menjadi sorotan berkaitan dengan adanya salah satu unsur demokratisasi berupa penyampaian kebebasan berpendapat (demonstrasi) banyak mengalami pertentangan. Hal ini terlihat dengan adanya potret kasus mahasiswa yang mengalami penangkapan dan pengamanan oleh pihak berwajib.<sup>16</sup> Demonstrasi dapat juga diartikan sebagai suatu aksi dalam bentuk unjuk rasa yang dilakukan dengan pemusatan suatu isu. demonstrasi dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni sebagai kekuatan check and balance, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.<sup>17</sup> Demonstrasi atau aksi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan di muka umum dan bagian dari perwujudan demokrasi yang dianut bangsa Indonesia.<sup>18</sup> Adapun beberapa kasus penangkapan tersebut yaitu mahasiswa di kabupaten Tangerang sebanyak 18 mahasiswa ditangkap polisi saat menggelar aksi unjuk rasa. Selanjutnya yaitu adanya kasus 10 mahasiswa

---

<sup>14</sup> Nur, Rizka Mutia. (2021) "75% Mahasiswa Golput Pemilu BEM, Sekretaris PPU: Itu Sudah Di Luar Kendali PPU," Ganto.co, <https://www.ganto.co/berita/4076/75-mahasiswa-golput-pemilu-bem-sekretaris-ppu-itu-sudah-di-luar-kendali-ppu.html>. [Accessed, Oktober 02.2021]

<sup>15</sup> P.A Bourne, *Modelling Political Trust in a Developing Country* Current, Research Journal of Social Sciences Volume 2, Nomor 2, Tahun 2010, Hal 84–98.

<sup>16</sup> Purnamasari S, Anugrah, *Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makassar*, Jurnal Bumi Indonesia Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Hal 28

<sup>17</sup> Rahman, Muhammad Gazali, *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)*, Jurnal Studia Islamika Volume 12, Nomor 2, Tahun 2015, Hal 349.

<sup>18</sup> Andrizal, "Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum," Jurnal Hukum Respublica Volume 16, Nomor 1 Tahun 2016, Hal 125.

Universitas Sebelas Maret Surakarta ditangkap saat kunjungan presiden pada 14 September 2021 silam serta permasalahan serupa lainnya. Hal inilah yang juga turut mendorong adanya anti demokrasi pada mahasiswa mengingat keberadaan hak untuk bebas menyampaikan pendapat menjadi salah satu hak esensial yang dimiliki oleh setiap warga negara. Lebih lanjut adanya kasus kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat penegak hukum di lapangan maupun Tindakan tidak pro dari pihak universitas menyebabkan proses demokratisasi di lingkungan universitas juga mengalami permasalahan yang serius. Selama aksi mahasiswa di bawah bendera #ReformasiDiKorupsi yang digelar di beberapa kota di Indonesia, Amar mendapatkan 72 pengaduan terkait kebebasan berpendapat dan/atau pelanggaran hak atas pendidikan yang tersebar di 15 provinsi.<sup>19</sup> Selanjutnya data yang dirilis Jarkam memperlihatkan medio 2016–2018 ada sekitar kurang lebih 5.000 mahasiswa terkena sanksi DO dari kampusnya karena beberapa hal, kritik terhadap kampus salah satunya.

Konstitusi sangat menghormati dan memberi tempat yang layak bagi masyarakat yang ingin melakukan demonstrasi di ruang publik.<sup>20</sup> Dalam kaitan ini sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi.<sup>21</sup> Partisipasi dan pengawasan kawula muda khususnya mahasiswa dimana memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam keberjalanan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik adalah sebuah kebutuhan untuk membuat generasi muda menjadi melek politik dan menjadi pemilih yang rasional.<sup>22</sup> Pendidikan politik sangat penting untuk membangun kesadaran warga negara untuk memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya.<sup>23</sup> Sedangkan dalam dunia Pendidikan sendiri, permasalahan mengenai pelanggaran nilai-nilai demokrasi juga masih banyak ditemui seperti adanya diskriminasi sosial, perkelahian antar pelajar, bullying antar siswa, adanya keikutsertaan siswa dalam kegiatan-kegiatan yang berpemahaman menyimpang dari nilai demokrasi dan fenomena tenaga pendidik yang otoriter. Paul Suparno menyatakan bahwa masih banyak guru tidak dapat menerima gagasan siswa yang berlainan dengan yang mereka ajarkan, siswa banyak dikekang kebebasan berpikirnya dan bahkan dimatikan kreativitasnya.<sup>24</sup> Pembekalan mengenai demokrasi menjadi hal utama yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan diluar pembelajaran yang dilaksanakan dilingkungan universitas akan menjadi pendorong pemaksimalan pelaksanaan demokrasi.

---

<sup>19</sup> Makdori, Yopi. (2019) *Larangan Demo Mahasiswa Dan Kegagalan Institusi Akademik Memahami Demokrasi*, Liputan 6, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4088457/larangan-demo-mahasiswa-dan-kegagalan-institusi-akademik-memahami-demokrasi> [Accessed, Oktober 03.2021]

<sup>20</sup> Pranadji, Tri, *Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi Di Indonesia*,” Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 26, Nomor 2 Tahun 2008, Hal 137.

<sup>21</sup> Budiono, *Mengagag Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 13, Nomor 1 Tahun 2017, Hal 38.

<sup>22</sup> Primahendra, Reney A.L, Riza. Tri Adi Sumbogo, *Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Komitmen Generasi Z Terhadap Pancasila*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 5, Nomor 1 Tahun 2020, Hal 168

<sup>23</sup> Asmika. Suharno Rahman, *Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4, Nomor 2, Tahun 2019, Hal 286.

<sup>24</sup> Widiastono, Tonny D, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, Tahun 2004.



Pembekalan ini tentunya memerlukan formulasi dan konsep pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi realitas yang terjadi agar dapat dengan mudah diterima oleh mahasiswa dan dapat terimplementasi dengan baik. Mengingat konteks mengenai demokrasi tentu memiliki cakupan yang sangat luas, dimana pelaksanaan demokrasi tidak hanya berpaku pada pelaksanaan pemilihan umum nasional namun juga meliputi musyawarah mufakat yang sering dilakukan serta kegiatan demokrasi lainnya. Selain itu permasalahan mengenai demokrasi tentu juga akan berimplikasi langsung pada pencapaian ketahanan nasional yang dalam hal ini berkaitan dengan ketahanan ideologi. Keberadaan pusat studi mengenai hal ini nantinya akan membantu penyusunan kurikulum dan kegiatan-kegiatan pendorong pelaksanaan demokrasi di lingkungan universitas berdasarkan riset dan penelitian kepada seluruh elemen universitas serta untuk dirumuskan seperti apa kegiatan dan pembelajaran demokrasi yang tepat diterapkan dalam lingkungan universitas. Hal ini menjadi penting mengingat mahasiswa menjadi tumpuan penerus pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional serta sesuai dengan falsafah bangsa.

## **2. Bentuk Penyelenggaraan Ideal Atas Pusat Studi Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Di Lingkup Universitas**

Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat.<sup>25</sup> Pendidikan demokrasi pada hakikatnya merupakan suatu sarana sosialisasi mengenai nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh warga negara. Adapun tujuan dari Pendidikan demokrasi yaitu untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui sarana-saran yang menanamkan pada generasi muda mengenai pengetahuan, kesadaran dan norma/nilai demokrasi. Sikap dan mental demokrasi harus ditanamkan dan dibiasakan melalui bahasa dan kajian serta kekuatan keteladanan.<sup>26</sup>

Pendidikan demokrasi adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara komperhensif, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik dilingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya.<sup>27</sup> Menjadi hal yang penting bahwasanya pelaksanaan Pendidikan demokrasi tentunya harus diselaraskan kurikulum yang dijalankan dengan kondisi praktis dan realitas yang ada pada masyarakat secara luas dan kondisi lingkungan universitas berkaitan dengan permasalahan mengenai pelaksanaan demokrasi yang ada dimana Pendidikan dianggap sebagai obat untuk menyembuhkan dan memperbaiki pemahaman demokrasi dan pengimplementasiannya. Tentu hal ini memerlukan waktu yang tidak singkat serta melalui berbagai proses penelitian dan pengamatan sosiologis terlebih dahulu. Keberadaan pusat studi sebagai bagian dari institusi Pendidikan tentu memegang peran penting dalam hal penyelarasan dan pelaksanaan demokrasi di

---

<sup>25</sup> Winataputra, Udin S., *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, Dan Praksis)*, Widya Aksara Press, Bandung, Tahun 2012.

<sup>26</sup> Mahmud, Amas, *Narasi Demokrasi*, Mata Padi Persindo, Yogyakarta, Tahun 2011.

<sup>27</sup> Sudarsono, Syahban Nur, *Implementasi Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS STUDY KASUS SMA Negeri 6 Takalar*, Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume VI, Nomor 1 Tahun 2018, Hal 101.

lingkungan universitas. Adapun penyelarasan dan pelaksanaan demokrasi tentu memerlukan tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan demokrasi tentu menjadi tugas pokok dan fungsi yang harus dipegang erat dan dilaksanakan secara kontinuitas hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Keajekan dan konsisten ini tentu harus dilaksanakan oleh suatu bagian studi yang berkewajiban menyusun dan melaksanakan Pendidikan demokrasi dengan baik dan relevan.

Adapun penyelenggaraan Pendidikan demokrasi ideal yang dapat diterapkan oleh pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional universitas berkaitan dengan tujuannya untuk menjamin pelaksanaan demokrasi dapat melaksanakan hal-hal dibawah ini diantaranya yaitu:

**a. Menyelenggarakan penelitian dan pengamatan terhadap kondisi praktis dan realitas yang ada dalam lingkungan masyarakat dan universitas**

Penelitian dan pengamatan merupakan hal yang paling fundamental bagi pusat studi untuk menentukan arah gerak dan formulasi yang tepat untuk diterapkan pada Pendidikan universitas agar dapat dengan mudah diterima dan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Adapun penelitian dan pengamatan ini dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan praktis yang terjadi dilapangan baik secara nasional maupun di lingkungan universitas. Mengingat permasalahan nasional yang dihadapi juga tentunya akan berdampak dan menghilir langsung pada wilayah dibawahnya baik secara regional maupun lokal. Sehingga penelitian secara menyeluruh pada berbagai masalah yang dihadapi tentunya dapat memberikan gambaran utuh mengenai permasalahan demokrasi yang terjadi dan merumuskan formulasi pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya dalam Pasal 3 bahwasanya Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lebih lanjut penelitian ini juga dilaksanakan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dinamika pemerintahan serta kondisi politik Indonesia juga memegang poin yang penting. Dimana diketahui bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya terdapat proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta dinamika perpolitikan berpengaruh besar dalam pemikiran kawula muda terhadap pelaksanaan demokrasi. Adapun hasil dari penelitian mengenai pemerintahan ini dapat menjadi pertimbangan penyusunan Pendidikan yang dapat menjelaskan dengan baik mengenai konsepsi demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya penurunan nilai demokrasi akibat adanya politisi dan pemerintahan yang memiliki karakter oportunistis, arogan, mementingkan kepentingan pribadi yang tentunya sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi seperti nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, dan juga kejujuran. Hal

ini dapat dilakukan dengan melakukan studi banding, dengar pendapat public (*public hearing*) dan *focus group discussion* kepada seluruh segmen masyarakat, mahasiswa, pihak universitas dan seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menemukan formulasi Pendidikan dan kurikulum yang sesuai dengan kondisi realitas serta dapat mengakomodir permasalahan yang ada.

Lebih lanjut penelitian ini tentu juga akan menjadi salah satu langkah optimalisasi yang saat ini telah dilakukan, dimana hasil penelitian terhadap hasil empiric ini dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan peraturan maupun regulasi skala universitas yang akan mendorong adanya pelaksanaan demokrasi dengan pengakomodiran mahasiswa dalam pelaksanaan dan penyusunannya. Selain itu penelitian ini juga mencakup penelitian pelaksanaan demokrasi terhadap perkembangan globalisasi dan perkembangan dunia secara keseluruhan. Dimana seperti diketahui dengan adanya perkembangan dunia dalam segala aspek kehidupan tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi dan ketahanan nasional Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi dan Pendidikan demokrasi yang sesuai diterapkan di lingkungan universitas dengan fleksibel namun tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tentu dapat dikemas melalui berbagai kegiatan yang mengombinasikan berbagai unsur kebaruan tersebut. penanaman demokrasi yang lebih masif tentu menjadi target yang harus dicapai oleh pusat studi untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan peradaban.

#### **b. Penyusunan pendidikan demokrasi dan keilmuan yang diterapkan pada lingkungan universitas**

Sebagai tindak lanjut adanya penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya tentu menghasilkan formulasi dan konsepsi Pendidikan demokrasi yang sesuai untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran mahasiswa. Penyelarasan dan pengakomodiran kondisi realitas dalam Pendidikan demokrasi ini tentu akan memberikan pemahaman yang lebih kompleks mengenai esensi dan nilai demokrasi yang sebenarnya mengenai penerapan demokrasi pada kondisi saat ini. Harapannya Pendidikan demokrasi ini dapat memperluas pemahaman mengenai demokrasi dimana demokrasi melingkupi berbagai bidang seperti demokrasi ekonomi, politik dan sosial sehingga akan memberikan kesadaran dan tanggung jawab pelaksanaan yang sesuai pada mahasiswa untuk diterapkan dengan baik. Terlebih di era perkembangan dunia saat ini tentu nilai demokrasi juga harus dipegang erat seiring dengan adanya tuntutan perkembangan yang harus diikuti.

Selain mengenai Pendidikan demokrasi yang sesuai dengan kondisi realitas demokratisasi saat ini, keberadaan hasil keilmuan demokrasi juga penting untuk dicapai. Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai literatur pembelajaran mengenai demokrasi yang diterapkan dan dihadapi saat ini, sehingga mahasiswa akan lebih memahami mengenai esensi demokrasi yang sesungguhnya dan dapat dijadikan alat untuk menambah, memperluas dan meluruskan pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi yang telah diketahui saat ini agar tidak menyebabkan adanya pemikiran

dan perbuatan penyimpangan demokrasi tersebut. lebih dari itu, adanya sumber keilmuan ini tentunya dapat dijadikan pedoman dan pegangan mahasiswa untuk dapat berperilaku dan menerapkan demokrasi dengan baik saat mahasiswa terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu memerlukan optimalisasi agar pendidikan ini dapat berjalan dengan baik menggunakan metode belajar lapangan dan pembelajaran mengenai demokrasi melalui perangkat modern seperti adanya Pendidikan demokrasi berbasis e-voting pada pemilihan umum raya di universitas, e-election pada pemilihan umum nasional serta penerapan metode sharing Pendidikan demokrasi antar dosen dengan mahasiswa maupun antar sesama mahasiswa. Dimana hal ini tentu akan mendongkrak lebih pemahaman dan minat mahasiswa dalam mengikutinya.

**c. Penyelenggaraan kegiatan demokrasi mahasiswa**

Salah satu tonggak penilaian dan penerapan demokrasi Pancasila serta Pendidikan demokrasi pada universitas salah satunya yaitu mengacu pada adanya penyelenggaraan kegiatan mahasiswa. Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemasifan penerapan demokrasi yang bersesuaian guna mengatasi permasalahan-permasalahan demokrasi melalui kegiatan secara langsung (praktik kegiatan). Adapun bentuk dari penyelenggaraan kegiatan demokrasi mahasiswa yang dapat dilaksanakan oleh pusat studi yaitu adanya penyelenggaraan kegiatan diskusi melalui *focus grup discussion, public hearing* dan dialektika antar mahasiswa maupun dengan pihak lain yang dapat memberikan pembelajaran demokrasi kepada mahasiswa mengenai berbagai isu mengenai demokrasi Indonesia yang harapannya dapat membuka pemahaman dan pengetahuan mahasiswa untuk menyikapi berbagai isu demokrasi yang berkembang atau sedang terjadi saat ini. Keberadaan pusat studi tentu memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mempelajari demokrasi dan penerapannya.

Selain kegiatan diatas, keberadaan kegiatan terjun kepada masyarakat dengan proyeksi jangka waktu pendek dan Panjang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pusat studi. Hal ini didasari bahwasanya semakin aktif mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan organisasi semakin baik sikap demokratis seorang mahasiswa. Sikap demokratis sangat diperlukan bagi seorang mahasiswa, terlebih ketika mereka ikut terlibat sebagai warga negara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>28</sup> Sebagai gambaran kegiatan penerapan demokrasi jangka pendek dapat dilaksanakan dengan program kegiatan mahasiswa melalui pengabdian masyarakat di sekitar universitas, kegiatan demokrasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dalam implementasinya disesuaikan dengan bidang kegiatan UKM tersebut, seperti UKM kepenulisan dan penelitian dapat menerapkannya dengan membuat karya tulis mengenai demokrasi yang dalam keberjalanan kepenulisan tersebut mahasiswa akan belajar demokrasi melalui berbagai literatur dan penelitian, UKM kesenian dan keolahragaan dapat

---

<sup>28</sup> Palli, Khristoforus, Abdul Gafur Ngongo, *Hubungan Keterlibatan Dalam Organisasi Badan (Bem) Dengan Keterampilan Berpikir Kritis Dan Sikap Demokratis Mahasiswa*, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 4, Nomor 1 Tahun 2017, Hal. 110.

menerapkannya dengan adanya penanaman jiwa demokrasi dalam ajang kompetisi, dimana pengemasan pembekalan demokrasi ini dapat secara langsung diterapkan oleh mahasiswa serta penerapan pada UKM lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan berkaitan dengan kegiatan jangka panjang dapat dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah Indonesia dan negara, dimana kegiatan ini tentu akan memberikan pembelajaran penerapan demokrasi secara langsung pada masyarakat yang plural serta adanya pengetahuan langsung mengenai sistem pemerintahan dan penerapannya di negara lain. Selain itu kegiatan jangka panjang juga dapat diterapkan dengan adanya kegiatan demokrasi pada lembaga-lembaga negara serta pemerintahan baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keberjalanan birokrasi dan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip dan nilai demokrasi.

Dengan adanya model penyelenggaraan pusat studi diatas tentu akan mengarahkan mahasiswa serta penyelenggaraan demokrasi di lingkungan universitas dapat terbentuk dengan baik melalui kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan diluar pembelajaran. Pembentukan pusat studi menjadi tonggak pemahaman universitas atas pentingnya penyaluran dan pengembangan keilmuan serta penerapan demokrasi di lingkungan universitas sebagai institusi Pendidikan yang memiliki tanggung jawab atas hal tersebut guna mencapai pelaksanaan demokrasi Indonesia yang lebih baik di kalangan kawula muda/mahasiswa.

#### **D. Penutup**

Keberadaan permasalahan mengenai penerapan demokrasi di kawula muda dalam hal ini mahasiswa tentu menjadi urgensi tersendiri bagi institusi pendidikan untuk turut mengatasi permasalahan tersebut. Universitas sebagai institusi pendidikan yang kompleks dimana dengan latar belakang dan pluralisme yang ada didalamnya tentu menjadi hal yang rawan apabila tidak terdapat pendampingan dan pembekalan mengenai Pendidikan demokrasi Pancasila pada mahasiswa. Keberadaan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional pada universitas menjadi urgensi tersendiri sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan atas menurunnya partisipasi dan penerapan demokrasi dalam kehidupan mahasiswa dan menjadi pendorong terlaksananya hal ini sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya formulasi pembelajaran dan Pendidikan demokrasi yang disesuaikan dan diselaraskan dengan kondisi realitas yang sedang terjadi sehingga akan memudahkan penerimaan dan peningkatan pemahaman pada mahasiswa. Lebih lanjut kegiatan diluar pembelajaran mengenai penerapan demokrasi dalam lingkungan masyarakat secara langsung. Sehingga pembekalan nilai-nilai demokrasi harapannya dapat dilaksanakan dengan maksimal melalui pembelajaran dan pelaksanaan melalui pusat studi demokrasi yang akan berimplikasi langsung pada tercapainya ketahanan demokrasi nasional. Perlunya sinergitas seluruh universitas untuk menyelenggarakan pusat studi demokrasi dan ketahanan nasional sebagai bagian penguatan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan demokrasi, perlunya kerjasama dengan pemerintah sebagai bagian dari penjamin terselenggaranya demokrasi di Indonesia serta perlunya pengakomodiran komunitas demokrasi di masyarakat guna mengoptimalkan penyebaran wawasan demokrasi menuju ketahanan nasional yang dicita-citakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Hatta, Mohammad, 1998, *Kebangsaan Dan Kerakyatan*, Jakarta LP3ES,  
Manan, Bagir, 1996, *Teori Dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 1966  
Mahmud, Amas, Narasi Demokrasi, Yogyakarta, Mata Padi Persindo  
P. Wiratman, Herlambang, 2016, *Penelitian Socio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*  
Reza .Max Traver Banakar, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research, Law, Sociology and Method*  
Wahjono, Padmo, 1993, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta Rineka Cipta.  
Widiastono, Tonny D, 2004, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta, Kompas Media Nusantara

### **Jurnal:**

- Abidin, M. Zainul. 2021, "Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian". *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 120. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.292>
- Andrizal, 2016, "Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum," *Jurnal Hukum Respublica* 16(1) Tahun 2016. 125.
- Asmika. Suharno Rahman, 2019 "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4(2) 286.
- Budiono, 2017, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 13(1), 38.
- Heri, Jon, 2015, Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum Di Indonesia, *Nurani Jurnal* 15(1), 92
- Muntoha Dan Puji Dwi Darmoko, 2017, "Pergeseran Demokrasi Pancasila Ke Demokrasi Liberal (Praktek Ketatanegaraan RI Pasca Reformasi)", *Jurnal Madaniyah* 7(2), 365
- P.A Bourne, 2010, "Modelling Political Trust in a Developing Country Current", *Research Journal of Social Sciences* 2 (2), 84–98.
- Pranadji, Tri, 2008, "Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penangannya Dalam Alam Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* 26 (2) 137.
- Palli, Khristoforus, Abdul Gafur Ngongo, 2017, "Hubungan Keterlibatan Dalam Organisasi Badan (Bem) Dengan Keterampilan Berpikir Kritis Dan Sikap Demokratis Mahasiswa", *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 4(1). 110.
- Primahendra, Roney A.L, Riza. Tri Adi Sumbogo, 2020, "Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Komitmen Generasi Z Terhadap Pancasila", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, (1) 168
- Purnamasari S, Anugrah, 2012, "Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktivitas Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makassar", *Jurnal Bumi Indonesia* 1(2), 28

- Rahman, Muhammad Gazali, 2015, “Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif Melalui Pendekatan Hukum Islam)”, *Jurnal Studia Islamika* 12(2),349.
- Rifaldi. Ronny Gosal dan Ventje Kasenda Pinilas, 2017, “Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud)”, *Eksekutif Jurnal* 2(2), 6
- Sudarsono, Syahban Nur, Implementasi 2018, “Pendidikan Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS STUDY KASUS SMA Negeri 6 Takalar”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi* VI(1) 101.

**Website:**

- CNN Indonesia. (2019) Survei Pemilu: Milenial Golput Diprediksi Di Atas 40 Persen, Cnnindonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190404174723-32-383507/survei-pemilu-milenial-golput-diprediksi-di-atas-40-persen>. [Accessed, Oktober 02.2021]
- Indikator. (2021). Survei Nasional Suara Anak Muda Tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa, <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator-21-Maret-2021.pdf>. [Accessed, September 30.2021]
- Investor.id, (2021) *LP3ES: Ada 31* Masalah Demokrasi Di Indonesia, Investor.id, 2020, <https://investor.id/nasional/lp3es--ada--31--masalah--demokrasi--di--indonesia>. [Accessed, Oktober 02.2021]
- Makdori, Yopi. (2019) Larangan Demo Mahasiswa Dan Kegagalan Institusi Akademik Memahami Demokrasi, Liputan 6, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4088457/larangan-demo-mahasiswa-dan-kegagalan-institusi-akademik-memahami-demokrasi> [Accessed, Oktober 03.2021]
- Nur, Rizka Mutia. (2021) “75% Mahasiswa Golput Pemilu BEM, Sekretaris PPU : Itu Sudah Di Luar Kendali PPU,” Ganto.co, <https://www.ganto.co/berita/4076/75-mahasiswa-golput-pemilu-bem-sekretaris-ppu-itu-sudah-di-luar-kendali-ppu.html>. [Accessed, Oktober 02.2021]
- Putra, Rizki Akbar (2021) Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah Dalam 14 Tahun Terakhir, Dw.com, <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>. [Accessed, Oktober 02.2021]
- Tribun Jatim. (2019) BPIP Sebut Ada 100 UU&Perda Potensi Bertentangan Pancasila, Hasil Kajian Berlanjut Judicial Review, <https://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2019/11/07/bpip--sebut---ada---%0A100---uu---perda---potensi---bertentangan---pancasila---hasil---kajian---berlanjut---judicial---review>. [Accessed, Oktober 02.2021]